

IMPLEMENTASI KINERJA PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BARRU**Ardiyanti Aris, Muhammad Natsir**Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
e-mail : Ardiyanti.onleonn@gmail.com, muhammadnatsir@stih.amsir.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kinerja Pegawai dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Telah dilakukan dengan mencapai target kinerja yang tertuang ke dalam 6 (Enam) Area Perubahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, namun belum berjalan secara maksimal.. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi kinerja pegawai dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru yaitu terbagi menjadi faktor Pendukung dan faktor penghambat. Bagi pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru agar lebih meningkatkan kinerja dan integritas serta Penambahan sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci : kinerja, pegawai.Korupsi**ABSTRACT**

This research aims to determine the efforts made by the Class IIB Barru State Detention Center employees in realizing a Corruption Free Area. This research was conducted at the Barru Class IIB State Detention Center. The data obtained came from primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and observations, then processed and analyzed based on qualitative problem formulation. The results of this research show that the implementation of employee performance in realizing a Corruption Free Area in the Barru Class IIB State Detention Center. This has been done by achieving the performance targets set out in 6 (Six) Areas of Change in the integrity zone towards an area free from corruption, but it has not yet run optimally. Factors that influence the implementation of employee performance in realizing an area free from corruption in the State Detention Center. Class IIB Barru is divided into supporting factors and inhibiting factors. For the Barru Class IIB State Detention Center to further improve performance and integrity as well as add supporting facilities and infrastructure.

Keywords : Performance, Employees, Corruption

PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan unsur aparatur sipil negara yang melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam mencapai tujuan negara, oleh karena itu pegawai negeri sipil dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.¹

Berkaitan dengan hal itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 12 menjelaskan bahwa “pegawai ASN.”²

Berdasarkan peraturan tersebut agar pemerintah dan Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dibutuhkan aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan untuk menjalankan tanggung jawab yang di berikan kepadanya dengan profesional, kompeten, serta memiliki integritas sehingga akan tercipta kinerja yang baik³

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti sangat penting manfaatnya, suatu lembaga menginginkan karyawan untuk bekerja sungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik, tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh karyawan maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sangat sulit tercapai. Kinerja pada dasarnya mencakup mental dan perilaku yang selalu mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas, tanpa adanya kinerja yang baik maka tidak ada pula pelayanan yang baik.⁴

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua

¹ Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (2019). Etika pemerinthan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

² Indonesia, P. R. (2014). Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

³ Hanibe, A. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

⁴ Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan (Studi di kantor badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa). *Governance*, 2(1).

telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.⁵

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat.⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi

aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.⁷

Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru, upaya dalam mewujudkan Zona Integritas di mulai dari mengembangkan lingkungan kerja instansi kedalam kelompok Wilayah Bebas dari Korupsi. Bukan hanya instansi yang bersih dari segala bentuk tindak pidana korupsi melainkan aspek–aspek penunjang seperti pelayanan prima, dan sarana dan prasarana yang memadai wajib tersedia guna menyukseskan program ini.

Dalam mncapai tujuan tersebut sangat diperlukan kekompakan dari seluruh elemen baik itu dari pegawai dan warga binaan pemasyarakatan serta Masyarakat itu sendiri. Untuk menyatukan semua elemen tersebut tidaklah mudah diperlukan integritas yang tinggi guna mencapai satu tujuan yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi.

Tantangan yang berat yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas II Barru dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi satu pokok yang penting untuk diketahui tentang bagaimana perjalanan dan upaya–upaya yang telah dihadapi pegawai rutan baru dalam pelaksanaan tugasnya. Terlepas dari

⁵ Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1-26.

⁶ Wahyuni, N. I., Kurrohman, T., & Sudarno, S. (2023). Pendampingan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Rsd Dr. Soebandi Kabupaten Jember. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3710-3714.

⁷ Nomor, P. P. (54). tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

maraknya Instansi–instansi pemerintah yang terindikasi dalam kinerjanya melakukan tindak pidana korupsi, baik itu pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, Penyalahgunaan Jabatan dan lain-lain.⁸

Berangkat dari hal tersebut sehingga dirasa dirasa perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Bagaimana Implementasi Kinerja Pegawai dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru serta apa faktor Pendukung dan faktor penghambat dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan Ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan

mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kinerja Pegawai dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barru

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru., mulai dipergunakan sejak tanggal 27 April 1997 sampai sekarang dengan luas bangunan 2.495 m2 dengan kapasitas hunian berjumlah 112 orang.

Jumlah pegawai sebanyak 53 orang yang terbagi menjadi petugas Administrasi sebanyak 26 orang dan petugas jaga sebanyak 27 orang. Pegawai laki-laki berjumlah 48 orang dan pegawai Perempuan berjumlah 5 orang.

Komitmen Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru secara nyata Menerapkan 6 (enam) area perubahan terbagi atas Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen

⁸ Saefudin, W. (Ed.). *Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi*. Kemenkumham Muda.

⁹ Juliardi, Budi, et al. *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.

¹⁰ Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. 6 (enam) area perubahan tersebut adalah komponen pengungkit yang menjadi tolak ukur keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasikan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan Masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barru telah melaksanakan berbagai aksi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai pada Area perubahan satu yaitu manajemen perubahan. Berdasarkan data yang berhasil di dapatkan aksi yang

dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru adalah

- a. Komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja dengan diselenggarakannya Pencanaan Zona Integritas, Penandatanganan Pakta integritas yang memuat penolakan segala bentuk tindakan kejahatan dalam birokrasi salah satunya adalah korupsi dan turunannya.
- b. Melaksanakan penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh pimpinan pada saat apel pagi dan mengadakan *Coffee morning* sebelum pelaksanaan tugas yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi sehingga terdapat tindak lanjut dalam kinerja.
- c. Penerapan agen perubahan yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di

lingkungan Rumah Tahanan negara Kelas IIB Barru agar semangat untuk menjadikan wilayah bebas dari korupsi tetap terjaga.

2. Penataan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru untuk memenuhi area perubahan kedua penataan tata laksana berdasarkan data yang di dapatkan adalah

- a. Telah dilakukan revisi untuk seluruh standar operasional prosedur (SOP) yang ada terkhusus pembaharuan dasar hukum Undang-undang Pemasyarakatan dari Undang-undang No. 12 Tahun 1995 menjadi Undang-undang No. 22 Tahun 2022.
- b. Telah dibuat rencana aksi peningkatan sistem pemerintah berbasis elektronik berdasarkan laporan hasil evaluasi (LHE) yang telah diberikan oleh Sekretaris Jenderal.
- c. Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik dengan penggunaan dari aplikasi *E-Performance* untuk pengukuran kinerja instansi dan aplikasi simpeg untuk mengukur capaian kinerja pegawai.
- d. Penyebaran informasi positif Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru melalui media sosial dan website guna mendorong semangat pegawai, Masyarakat, maupun keluarga narapidana bahwa seluruh kegiatan di Rumah tahanan negara kelas IIB Barru bermanfaat bagi orang yang berada di dalam maupun diluar dan sekitarnya.

3. Penataan Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Sipil Negara. Implementasi kinerja yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru dalam Area perubahan ketiga penataan manajemen SDM adalah

- a. Pola Mutasi Internal, dimana pimpinan Bersama seluruh jajaran pejabat structural Bersama sama melakukan evaluasi dan menganalisis kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi Pendidikan sebagai penyegara tugas dan fungsi serta menjadi penguatan dalam peningkatan kinerja pegawai.
- b. Pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan tiap bulan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kinerja yang positif kepada Rutan Barru serta memotivasi pegawai

untuk terus menunjukkan kinerja terbaik.

- c. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dimaksudkan agar kualitas SDM terus meningkat dapat memberikan *sharing knowledge* kepada pegawai lainnya.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertnggjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru sesuai data yang telah dihimpun adalah

- a. Keterlibatan Pimpinan dalam segala bentuk pelaksanaan kinerja, baik dalam memimpin rapat dan memimpin apel menjadi sebuah role model bagi jajaran dibawahnya untuk

- mencapai tujuan yang telah ditargetkan pada rencana kerja yaitu mewujudkan Rutan Barru memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
- b. Pimpinan melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk melihat capaian kinerja dan anggaran khususnya selama Triwulan I dan II Tahun 2023. Hal ini untuk menjadi kontrol pimpinan agar wilayah rutan barru terhindar dari praktik korupsi yang sering terjadi pada instansi pemerintah.
 - c. Telah dibuat rencana penarikan dana (RPD) Bersama Coach 42 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang secara konsisten memantau setiap pencairan dana agar sesuai RPD yang telah dibuat sebelumnya.
 - d. Mengirimkan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Semester I Tahun 2023.
5. Penguatan Pengawasan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Upaya yang dilakukan adalah
 - a. *Public campaign* tentang pengendalian gratifikasi sebagai salah satu upaya Rutan Kelas IIB Barru secara sadar berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi dimulai dengan melakukan sosialisasi dan bertemu langsung dengan pengguna layanan.
 - b. Menghadirkan mitigasi resiko yang merupakan sistem pengendalian yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis dengan cara mengidentifikasi resiko mulai dari yang terkecil dan berpotensi terjadi disertai dengan pengendalian untuk

- mencapai tujuan organisasi.
- c. Memfasilitasi Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan secara langsung maupun melalui media pengaduan lainnya seperti sosmed , Aplikasi SIPIDU dan *Call Center*.
 - d. Membentuk Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Sat Ops Patnal) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi petugas/pegawai Rutan Kelas IIB Barru.
 - e. Membuat Surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan yang ditandatangani oleh seluruh pejabat struktural dan pejabat pengelola keuangan yang menyatakan sikap untuk profesional, transparan dan akuntabel, terhadap segala bentuk pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru.
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Suatu Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi Pelayanan Publik pada Rutan Kelas IB Barru secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Barru untuk memenuhi targer dari area perubahan enam yaitu

- a. Membentuk duta layanan yang menjadi wajah instansi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai maklumat pelayanan yang telah dibuat.
- b. Mengajak Masyarakat untuk berpartisipasi dalam reviu standar pelayanan agar tercipta layanan yang ramah dan diterima oleh Masyarakat dan menekankan untuk tidak memeberi sesuatu imbalan kepada petugas karena segala layanan yang diberikan adalah gratis.

Dengan tercapainya disetiap unsur 6 (enam) area perubahan yang menjadi komponen pengungkit zona

integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Rutan kelas IIB Barru, menjadi langkah awal untuk mencapai target kinerja. Segala aspek dalam ke enam area perubahan menjadikan Rutan Kelas IIB Barru menjadi lingkungan dimana pegawai akan terus menjaga integritas untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak negatif kepada instansi, tidak melakukan pungutan liar, gratifikasi, benturan kepentingan, dan segala hal yang dapat mencemari nama baik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pegawai Rutan Barru dengan kinerjanya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi merupakan suatu bentuk nyata bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Upaya Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru

Untuk Mencapai target kinerja Wilayah Bebas dari Korupsi di Rutan Kelas IIB Barru terdapat beberapa faktor pendukung dan faktaoor penghambat yang memengaruhi

perjalanan pegawai Rutan Barru untuk mewujudkan target tersebut.

1. Faktor Pendukung

a. Nilai Persepsi Korupsi

Merupakan salah satu Komponen Hasil Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Nilai persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholder yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja. Beberapa hal utama terkait komponen survei ini adalah Diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, menerima imbalan/ gratifikasi, percaloan dan pungutan liar dengan skala 4 sesuai aturan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan Masyarakat.

Hal ini terlihat dari survei responden yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru kepada Masyarakat dan pegawai mengenai tingkat persepsi korupsi yang ada pada Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB
 Barru

Tabel 3. Nilai Persepsi Korupsi Rutan
 Kelas IIB Barru

No	Bulan	Responden	Nilai IPK
1	Mei	56	3.85
2	Juni	36	3.95
3	Juli	49	3.92
4	Agustus	36	3.99
5	September	40	3.99

Sumber: Survei Balitbangham

Pada pelaksanaan survei di bulan Mei sampai September 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru secara rata-rata memperoleh nilai 3.93 dalam skala 4 atau Nilai 17.01 dalam skala 17.50 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru telah memperoleh kategori sangat baik.

Hal ini menegaskan bahwa kinerja pegawai Rutan Kelas IIB Barru mendapat apresiasi tinggi dalam hal pemberantasan korupsi dilingkup kerja instansi oleh Masyarakat.

Dengan skor rata-rata 3.93 Rutan kelas IIB Barru berpeluang mendapatkan predikat menjadi Instansi Pemerintah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Lebih baik, dilakukan pengukuran untuk memastikan bahwa selain dari aspek pelayanan serta integritas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru memperhatikan ketercapaian kinerja terhadap kinerja yang diperjanjikan.

Tabel 4 Capaian kinerja Rutan Kelas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023 (Semester I)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	1.Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	126%
		2.Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	67%
		3.Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	0%
		4.Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	0%
		5.Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	6.Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	97%
		7.Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)	80%	100%	0%
		1.Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	90%	100%	2,1%
		2.Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	0%
		3.Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	8,7%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1.Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	0%
		2.Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	0%
		3.Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	0%
		4.Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%	0%

4. Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen satter	1.Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
	2.Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	100%	100%
	3.Terpuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100%	100%
	4.Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
	5.Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%

Sumber: E-Performance data per 16 Agustus 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, pencapaian target kinerja pegawai Rutan Kelas IIB Barru telah berjalan dengan baik walaupun ada target kinerja yang pencapaiannya masih belum mencapai target yang telah diperjanjikan akan tetapi Sebagian besar target kinerja yang lain sudah mencapai target yang diperjanjikan.

c. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Sasaran terwujudnya kualitas pelayanan public yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan. Pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survei kepuasan Masyarakat (SKM). Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Rutan Kelas IIB Barru

No	Bulan	Responden	Nilai IPK
1	Mei	56	3.88

2	Juni	36	3.92
3	Juli	49	3.91
4	Agustus	36	3.99
5	September	40	3.99

Sumber: Survei

Balitbangham

Pada pelaksanaan survei di bulan Mei sampai September 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru secara rata-rata memperoleh nilai 3.95 dalam skala 4 atau Nilai 17.03 dalam skala 17.50 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru telah memperoleh kategori sangat baik.

Pelaksanaan Survei IKM ini, menjadi tolak ukur bagi Masyarakat yang menjadi pengguna layanan bahwa layanan yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru telah sesuai dengan standar pelayanan yang mengedepankan segala layanan yang diberikan adalah gratis dan tidak dipungut biaya.

Integritas pegawai dalam pelaksanaan kinerja sudah diperlihatkan oleh Rutan barru dengan adanya survei tersebut. Dengan sinergi kepada Masyarakat dan penguatan yang dilakukan oleh pimpinan mampu meningkatkan moral pegawai untuk tetap menjaga

integritas dalam pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi.

2. Faktor Penghambat

Adanya faktor pendukung tidak terlepas adanya faktor penghambat dalam upaya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi.

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam mewujudkan Rutan Barru berpredikat WBK. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat sulit untuk melakukan kinerja yang optimal.

Walaupun peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan akan tetapi masih banyak sarana yang perlu diperbaiki dan di tambahkan untuk memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Adapun saran yang dianggap perlu untuk ditingkatkan atau ditambahkan dalam upaya Rutan Barru mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi,

- 1) Jaringan Internet yang Stabil

- 2) Penambahan Perangkat Komputer
- 3) Pemasangan Pendingin Ruangan dalam Ruang Server SDP
- 4) Penambahan Brizzi pay bagi Warga binaan pemasyarakatan agar mencegah adanya uang tunai di dalam Blok Hunian dan juga meminimalisir terjadinya pungutan liar.
- 5) Penambahan cctv agar kontrol dalam pelaksanaan kinerja tetap terjaga
- 6) Pengadaan alat xray untuk pengeledahan pengunjung maupu petugas.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru sebanyak 53 orang berbanding 275 orang Warga binaan Pemasyarakatan per tanggal 10 Oktober 2023. Jumlah pegawai yang sedikit sangat berpengaruh pada layanan yang diberikan kepada WBP.

Selain itu, dampak dari kurangnya pegawai yaitu terdapat petugas rangkap jabatan sehingga tidak fokus dalam satu pekerjaan.

Akan tetapi dengan jumlah pegawai tidak memadai dengan jumlah pengguna layanan, pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru tetap melaksanakan kinerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Kinerja Pegawai dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru. Telah dilakukan dengan mencapai target kinerja yang tertuang ke dalam 6 (Enam) Area Perubahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, namun belum berjalan secara maksimal.
2. Adapun faktor pendukung dalam mewujudkan Rutan Kelas IIB Barru menuju wilayah bebas dari korupsi dengan mencapai komponen hasil lewat survei nilai persepsi Korupsi dan nilai persepsi kualitas layanan yang telah berhasil mencapai target di atas rata-rata atau sangat baik. Faktor penghambat dalam upaya Rutan Barru menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu ada pada faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor sumber daya manusia yang sedikit.

Saran

1. Bagi pihak Rutan Kelas IIB Barru agar lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan integritas dalam upaya mencegah perilaku korupsi dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru.
2. Penambahan sarana/prasarana yang belum ada ataupun rusak serta Pemerintah diharapkan untuk dapat terlibat langsung mengatasi masalah kekurangan fasilitas yang dapat menjadi kendala dalam jalannya proses pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Hanibe, A. M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1–26.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara*.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Nomor, P. P. (54 C.E.). *tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi*. Perpres.
- Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (2019). Etika pemerinthan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23852/23501>
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan (Studi di kantor badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa). *Governance*, 2(1).
- Saefudin, W. (n.d.). *Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi*. Kemenkumham Muda.
- Wahyuni, N. I., Kurrohman, T., & Sudarno, S. (2023). Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk/Wbbm Di Rsd Dr. Soebandi Kabupaten Jember. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3710–3714.

<https://e-performance.kemenkumham.go.id/>
<https://rutanbarru.kemenkumham.go.id/>
<https://pengaduan.kemenkumham.go.id/>
<https://simpeg.kemenkumham.go.id/>
<https://survei.balitbangham.go.id/survey/>

Website

<https://erb.kemenkumham.go.id/>